

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang

Muhamad Hilmi Rozaldi¹, Muhammad Khoirul Anwar²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail : hilmirozaldi93@gmail.com¹, m.khoirulanwar@umj.ac.id²

Abstract This research was triggered by the lack of effectiveness in implementing flood management measures at the regional, village and community levels. Problem identification shows that the coastal area of Tangerang Regency has a low risk of flooding and damage due to tidal waves, this was obtained from a preparedness study which showed a low regional resilience index, preparedness index and flood implementation capacity index. The aim of this research is to evaluate the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning the Implementation of Disaster Management in Flood Management in the Coastal Area of Tangerang Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach, and data collection is carried out through observation, interviews and documentation. In its analysis, this research refers to Van Metter and Van Horn's theory which includes indicators such as policy standards and objectives, resources, inter-organizational relationships, characteristics of implementing agents, economic, social and political environmental conditions, and implementing arrangements. The research results show that policy standards and objectives have not been implemented optimally, and policy objectives do not have a significant impact according to existing regulations. BPBD Tangerang Regency is experiencing a shortage of resources, both in terms of the quality of human resources, budget and materials. Although relations between organizations are maintained, they have not yet reached optimal levels. Communication with village officials is not well informed to the community, so that synergy and cooperation with the community in Tanjung Burung and Tanjung Pasir Villages has not been fully realized, especially in the coastal areas of Tangerang Regency. There is a positive attitude of implementers towards policies, but realistic and preventive action is needed in disaster management. Economic, social and political environmental conditions do not fully support the implementation of disaster management.

Keywords: Implementation, Policy, Regional Regulation, Disaster Management, Coastel Area

Abstrak Penelitian ini dipicu oleh kurangnya efektivitas dalam menerapkan langkah-langkah penanggulangan banjir di tingkat wilayah, desa, dan masyarakat. Identifikasi masalah menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Tangerang memiliki risiko rendah terhadap banjir dan kerusakan akibat rob, hal ini diperoleh dari kajian kesiapsiagaan yang menunjukkan indeks ketahanan wilayah, indeks kesiapsiagaan, dan indeks kapasitas pelaksanaan banjir yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisisnya, penelitian ini merujuk pada teori Van Metter dan Van Horn yang mencakup indikator seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, serta tatanan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum diimplementasikan secara optimal, dan tujuan kebijakan tidak memberikan dampak yang signifikan sesuai peraturan yang ada. BPBD Kabupaten Tangerang mengalami kekurangan sumber daya, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, anggaran, maupun material. Meskipun hubungan antar organisasi tetap terjaga, namun belum mencapai tingkat optimal. Komunikasi dengan perangkat desa kurang diinformasikan kepada masyarakat, sehingga sinergi dan kerjasama dengan masyarakat di Desa Tanjung Burung dan Tanjung Pasir belum sepenuhnya terwujud, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Sikap positif pelaksana terhadap kebijakan ada, namun perlu tindakan realistik dan preventif dalam penanggulangan bencana. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tidak mendukung sepenuhnya pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kawasan Pesisir

PENDAHULUAN

Secara letak geografis dan kondisi geologis, Indonesia termasuk negara dengan kategori rawan bencana alam, hal ini diakibatkan oleh bertemunya tiga lempeng tektonik aktif

yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia & Lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia di kelilingi oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudra yaitu samudra pasifik dan samudra hindia. Terlepas dari faktor geologis, Indonesia juga dilewati oleh garis Khatulistiwa yang menyebabkan memiliki iklim tropis dan tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi (Sulaiman et al. 2020).

Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan di daratan atau permukaan yang disebabkan oleh tingginya debit air yang tinggi dalam waktu tertentu. Peristiwa ini disebabkan banyaknya pembangunan gedung pencakar langit yang tidak melihat keseimbangan alam. Selain itu, masih rendahnya pengelolaan sampah, tidak adanya reboisasi, serta sistem drainase yang belum optimal yang menyebabkan terjadinya banjir di kota-kota besar di Indonesia (Nur Aeni 2021).

Pesisir merupakan daerah yang sangat penting bagi Indonesia. Hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di daerah pesisir karena tersedia ruang potensial untuk perkembangan kota dan industri di masa mendatang. Namun, saat ini banyak kota dan fasilitas di daerah pesisir telah merasakan dampak dari bahaya pesisir berupa erosi dan banjir rob yang akhirnya mengancam fungsi dari kota dan fasilitas itu sendiri. Banjir pesisir (dikenal juga dengan banjir rob) dan erosi merupakan masalah yang umum dijumpai di pantai utara Jawa yang disebabkan oleh dua faktor yakni faktor oseanografi dan faktor ekologi, meliputi land subsidence, banjir muara, kerusakan ekosistem mangrove dan ketidakstabilan pantai.

Indonesia terdiri dari berbagai pulau mulai dari sabang sampai merauke yang rawan akan bencana alam, salah satunya bencana banjir. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 1.794 sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.246 kejadian bencana banjir terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini sebagaimana banyaknya permasalahan terkait penanggulangan banjir beberapa daerah di Indonesia.

Banjir di Kabupaten Tangerang terjadi karena lima sungai di sekitar wilayah tersebut meluap. Pertama, Sungai Cisadane menyebabkan genangan air di Kecamatan Legok, Curug, Sepatan, Pakuhaji, dan Teluknaga. Kedua, Sungai Cirarab menyebabkan genangan air di Kecamatan Legok, Curug, Cikupa, dan Pasar Kemis. Ketiga, Sungai Cimanceuri menyebabkan genangan air di Kecamatan Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja, Sukadiri, Jambe, Rajeg, Pagedangan, dan Kronjo. Keempat, Sungai Cidurian menyebabkan genangan air di Kecamatan Cisoka, Jayanti, Kresek, dan Kronjo. Dan yang kelima, Sungai di Kecamatan Kelapa Dua turut menyebabkan genangan air. (Hardjono 2020)

Keseluruhan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi risiko mengalami bencana banjir. Menurut BPBD Kabupaten Tangerang, terdapat lima kecamatan yang memiliki risiko banjir yaitu Kecamatan Pasar Kemis, Jayanti, Teluknaga, Pakuhaji, dan Legok. (Terpadu 2022).

Termasuk wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang mengalami dampak dari adanya banjir. Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pesisir sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan dari 29 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kronjo, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi (Kelautan 2009).

METODE

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang dilakukan secara alamiah dengan menganalisis data yang terkumpul untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Penggunaan teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Sementara itu, teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai mencakup Pejabat Fungsional Penata Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Tanjung Burung, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Pasir, serta tiga orang masyarakat dari Desa Tanjung Pasir dan tiga orang masyarakat dari Desa Tanjung Burung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil analisis dan penelitian ini mencakup informasi dan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian ini telah disesuaikan dengan penerapan teori yang diusulkan oleh Van Metter Van Horn. Teori tersebut mengidentifikasi tiga indikator utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pembahasan selanjutnya didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap indikator penelitian tersebut.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam aspek pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana, belum memiliki perencanaan yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait, belum adanya peraturan pada tingkat desa, belum idealnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai BPBD dalam melaksanakan penanggulangan banjir karena BPBD terbagi menjadi 2 (urusan) yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta sarana dan prasarana untuk menopang 2 (dua) sub urusan tersebut

Pada aspek pelayanan tanggap darurat, BPBD Kabupaten Tangerang belum memiliki regulasi yang mengatur pada saat terjadinya bencana baik berupa peraturan bupati ataupun peraturan yang sejenisnya. BPBD Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan hak dan wewenangnya sesuai tugas dan fungsi, namun hasilnya belum berjalan optimal karena dalam implementasinya masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Tangerang belum tersentuh untuk pengurangan risiko bencana dan belum ada tindak lanjut terkait beberapa daerah yang termasuk daerah rawan bencana serta belum meratanya Desa Tangguh Bencana (Destana) atau Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) di Kabupaten Tangerang.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain; belum adanya regulasi daerah yang mengatur terkait rehabilitasi dan rekonstruksi dan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu BPBD melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD-OPD terkait dalam upaya mengembalikan kehidupan masyarakat. Karena BPBD itu bersifat komando dan kordinatif dalam proses pasca bencana.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam sumber daya anggaran BPBD Kabupaten Tangerang mengacu pada Pasal 56 Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada standar pelayanan minimum sub urusan kebencanaan pada BPBD Kabupaten Tangerang memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 38.323.505.584,- dengan realisasi sebesar Rp 35.893.536.891,- atau sebesar 93,66% dari total anggaran yang tersedia dengan memiliki 3 (tiga) program yaitu program penanggulangan bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Burung, pada tahun 2023 belum termuat rincian pendanaan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Tangerang, serta belum adanya sumber informasi yang diperoleh baik melalui publikasi akuntabilitas anggaran. Desa Tanjung Burung memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 3.450.991.043,- dengan mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana 5% dari total dana desa yang dimiliki pada tahun 2022 yaitu sekitar Rp. 172.549.552,- dan untuk mayoritas dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 60% dikarenakan kondisi covid-19 yang melanda

masyarakat Desa Tanjung Burung. Begitu pula dengan Desa Tanjung Pasir yang memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.917.677.970,.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam sumber daya manusia dan sumber daya materiil BPBD Kabupaten Tangerang memiliki pegawai sebanyak 306 orang dan BPBD telah memiliki sarana dan prasarana yang akan berpengaruh langsung terhadap operasional kerjanya. BPBD memiliki 12 Pos di tiap Kecamatan yang ada namun idealnya di setiap kecamatan atau kelurahan minimal terdapat satu pos damkar.

Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan komunikasi, dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dengan stakeholder yang turut andil dalam penanggulangan banjir. Adapun ketika fase tanggap banjir, OPD- OPD terkait otomatis terlibat dalam upaya penanggulangannya. Namun ketika tidak terjadi banjir OPD-OPD melakukan upaya-upaya penanggulangan berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rehabilitasi dan renkontruksi serta mitigasi struktural. Adapun untuk pemenuhan pencapaian anggaran dalam upaya penanggulangan bencana khususnya dalam fase prabencana, BPBD telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak NGO yang bergerak dibidang kebencanaan yaitu Wahana Visi Indonesia (WVI).

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan komunikasi, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Tangerang mengelola penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga bidang utama. Pertama, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menangani fase prabencana. Kedua, bidang Kedaruratan dan Logistik yang menangani fase saat terjadi bencana. Ketiga, bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menangani fase pasca bencana.

BPBD Kabupaten Tangerang telah mendirikan struktur organisasi dengan pembagian tugas kepada pegawai pada masing-masing bidang yang relevan. Dasar hukum untuk kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 114 Tahun 2016. Dokumen hukum ini menjelaskan hierarki dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang. Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki tiga tugas pokok dan fungsi, yakni fungsi koordinasi, pelaksana, dan komando.

Kecenderungan Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan komunikasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait kebijakan penanggulangan bencana, khususnya banjir yang diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah terimplementasikan dengan baik oleh BPBD Kabupaten Tangerang dan aparaturnya. BPBD Kabupaten Tangerang telah berhasil menjalankan kegiatan penanggulangan bencana secara berkelanjutan, dimulai dari perencanaan dengan pembuatan Kajian Risiko Bencana (KRB) hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Meskipun demikian, dalam realitas masyarakat, belum terlihat dampak pencegahan yang signifikan dari tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang, terutama pada tingkat desa. Masyarakat lebih cenderung mengharapkan adanya kegiatan konkret dari pihak terkait dalam upaya penanggulangan banjir, seperti kegiatan di fase prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Dalam hal ini, masyarakat desa tidak menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan komentar, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat pesisir khususnya di Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir dapat diklasifikasikan kurang baik atau masih berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kondisi tempat tinggal yang mulai rusak, kondisi jalanan yang rusak akibat terdampar banjir dan rob. Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

Dalam kondisi sosialnya akses Pendidikan memiliki beberapa kendala yakni kepemilikan fasilitas Pendidikan di Kawasan pesisir. Desa Tanjung Burung memiliki fasilitas pendidikan SD Negeri sebanyak 1 sekolah, sedangkan Desa Tanjung Pasir memiliki fasilitas sebanyak 2 SD Negeri dan 1 SD Swasta, SMP/MTS sebanyak 2 sekolah. Jika dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir, maka 2 (dua) desa di pesisir tersebut dalam sektor pendidikan belum dapat dikatakan mencukupi. Kemudian dalam upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam. Desa Tanjung Burung sudah memiliki peringatan dini terjadinya bencana alam, namun belum memiliki rambu dan jalan evakuasi ketika terjadi bencana alam, perlengkapan keselamatan serta belum ada upaya untuk menormalisasi sungai yang ada disekitaran kali cisadane, sedangkan Desa Tanjung Pasir belum memiliki sistem peringatan dini bencana alam dan perlengkapan keselamatan serta rambu-rambu atau jalannya evakuasi ketika terjadi bencana dan tetapi sudah melakukan normalisasi sungai.

Sedangkan untuk kondisi politiknya, dari aparaturnya Desa Tanjung Burung kepada penanggulangan banjir sudah ada, dalam hal ini pemerintah desa sudah membuat forum/rapat untuk membahas penanggulangan banjir di Desa Tanjung Burung. Adapun aparaturnya Desa

Tanjung Pasir juga telah membentuk sebuah forum untuk membahas penanggulangan banjir di Desa Tanjung Pasir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang dapat ditarik kesimpulan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir belum merasakan dampak yang signifikan dari regulasi yang ada. Belum meratanya pembentukan Destana/Katana di wilayah Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan banyak desa yang belum mandiri dalam menangani banjir. Kurangnya koordinasi antar OPD-OPD terkait yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan. Sumber daya yang belum memadai baik pada sumber daya manusia, anggaran, dan material BPBD Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan banjir.

Hubungan antar organisasi yang dilakukan sudah cukup baik dalam segi komunikasi dengan OPD-OPD terkait, swasta, pendidikan yang bergerak dalam bidang kebencanaan. Namun komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat desa pesisir belum optimal karena komunikasi hanya dilakukan sampai dengan pemerintah desa. Belum optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari pemerintah daerah (BPBD) dan pihak pengembang (PT. Agung Sedayu Grup). Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini BPBD Kabupaten Tangerang belum dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan belum ada sinergitas antara BPBD dengan masyarakat terkait upaya mitigasi bencana. Kecenderungan pelaksana (disposisi implementor) dalam hal ini BPBD Kabupaten Tangerang sudah dapat memahami isi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun perlu adanya realisasi pengembangan dan penguatan terhadap mitigasi bencananya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang diperlukan koordinasi pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah untuk membuat perencanaan pencegahan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang secara terintegrasi. Perlunya kejelasan wewenang dan tugas antara stakeholders yang ada di daerah dengan stakeholders yang ada dipusat. Perlu adanya program dan kegiatan lebih lanjut yang dilakukan oleh BPBD, OPD terkait, pihak swasta, pemerintah desa, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. 2 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia. Anies. 2018. *Manajemen Bencana (Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana)*. Pertama. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- BNPB. 2017. *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana Nasional*.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Vol. 21. 1 ed. Gorontalo: Penerbit UNG Press Gorontalo.
- Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, dan Hayat M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. 1 ed. diedit oleh A. K. Muzakkir. Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan*. 4 ed. diedit oleh S. Y. Suryandari. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, dan I. G. Boy Darmawan. 2018. *Mitigasi Bencana Alam*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. diedit oleh P. Christian. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Jurnal:

- Adi, Asfirmanto W., Osmar Shalih, Fathia Z. Shabrina, Ahmad Rizqi, Anggara S. Putra, Rafa Karimah, Franta Eveline, Afif Alfian, Syauqi, Rizky Tri Septian, Yudhi Widiastomo, Yusuf Bagaskoro, Afifa Nomita Dewi, Irena Rahmawati, dan Seniarwan. 2022. "Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2021." 11–13.
- Aseseang, F. Ermaula, Daningsih Sulaeman, Achmad Sjarmidi, Hamzah Latief, dan Muhammad Khoirul Anwar. n.d. "Livable and Integrated Sayung Eco-Industrial District to Catalyze Sustainable Growth of Central Java Oleh : Tim Jagabhumi (Ermaula , dkk .) Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan."
- ASYIAWATI, YULIA, dan LELY SYIDDATUL AKLIYAH. 2017. "Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 14(1):1–13. doi: 10.29313/jpwk.v14i1.2551.
- Atika, Debit. 2019. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana: Adaptasi dan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Pariwisata Provinsi Bali."
- Deriyanto, Demmy, Fathul Qorib, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana, dan Tunggadewi Malang. 2018. *PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK*. Vol. 7.
- Dwi, Anita, Tri Yulianti, dan Adi Susiantoro. 2022. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo."

- Feni, Miawaty. 2021. "Mengungkap Dampak Covid-19 Pada Pelaku UMKM Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun)." 20–30.
- Kristian, Indra. 2019. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat." 1–23.
- Muhammad, Feny Irfany, dan Yaya M. Abdul Aziz. 2020. "Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11(1):52–61. doi: 10.23969/kebijakan.v11i1.2235.
- Nur Aeni, Siti. 2021. "Ulasan Tentang Banjir dari Pengertian Sampai Cara Mencegahnya." Oktober 26.
- Pemberdayaan, Studi, Pengamen Dan, Andi Rahmadi, Mega Yolanda, dan Dinda Sandy. 2014. "DI KOTA PROBOLINGGO IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER POLICY IN PROBOLINGGO CITY (STUDY OF EMPOWERMENT OF BIDDERS AND BEGGERS) (Case Study of Empowerment of Singers and Beggars in Probolinggo City)."
- Rachman, Tahar. 2018. "Faktor faktor yang menyebabkan bencana banjir dan adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 10–27.
- Rumaseuw, Hendrik Kristian. 2022. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA." 1–9.
- Setiawan, Heri, dan Supriatna. 2021. "MONITORING PERUBAHAN GARIS PANTAI UNTUK EVALUASI RENCANA TATA RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TANGERANG." *Jurnal Sains Informasi Geografi [JSIG]* I(November):40–43. doi: 10.31314/j.
- Sulaiman, Muhammad Enggi, Haris Setiawan, Muhammad Jalil, Fathan Purwadi, Christopel Adio S, Asri Wahyu Brata, dan Andi Syaful Jufda. 2020. "Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda." *Jurnal Geografi Gea* 20(1):39–43. doi: 10.17509/gea.v20i1.22021.
- Yusup, Muhammad Ali, Hanny Purnamasari, Kariena Febriantini, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, dan Universitas Singaperbangsa Karawang. 2022. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi." 6(4):2138–45. doi: 10.36312/jisip.v6i4.3608/http.

Website :

Admin djpb Kemenkeu. (2022). "Strategi Organisasi KPPN Pelaihari".

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pelaihari/id/profil/strategi-organisasi.html> - diakses pada 4 Agustus 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2019. "Logo BNPB." Diambil 15 Juli 2023 (<https://elearning.bnpb.go.id/>).

BNPB. 2021. "Rangkuman Bencana tahun 2021." Diambil 24 Oktober 2022

(<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2021>).

BNPB. 2022. "Rangkuman Bencana tahun 2022." Diambil 24 Oktober 2022

(<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2022>).

Google Maps. 2023. "Peta Wilayah Desa Tanjung Burung." Diambil 18 Juni 2023

(<https://www.google.com/maps/place/Tanjung+Burung,+Teluknaga,+Tangerang+Regency,+Banten/@-6.0379876,106.6007769,13z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2e6a043d38baa5ad:0x7581bc7c7500a2f!8m2!3d-6.0318711!4d106.6379724!16s%2Fg%2F1z2v7yfyh?hl=en&entry=ttu>).

Hardjono, Joniansyah. 2020. "Banjir Kabupaten Tangerang Disebabkan Meluapnya 5 Sungai ini." Diambil 7 Februari 2023

(<https://metro.tempo.co/read/1292942/banjir-kabupaten-tangerang-disebabkan-meluapnya-5-sungai-ini>).

oase admin indonesia. 2022. "Warga Desa Tanjung Pasir Sudah 3 Bulan Tergenang Banjir, OPD Pemkab Tangerang Bersama Pengembang Baru Gelar Rapat Koordinasi." Diambil 27 Juni 2023

(<https://oaseindonesianews.com/kabupaten-tangerang/warga-desa-tanjung-pasir-sudah-3-bulan-tergenang-banjir-opd-pemkab-tangerang-bersama-pengembang-baru-gelar-rapat-koordinasi/>).

Pemerintah Desa Tanjung Burung. 2022. "APDes Tanjung Burung Tahun Anggaran 2022." Diambil 3 Juli 2023

(<https://www.tanjungburung.desa.id/data-apbdes/2022>).

Rakyat, Media. n.d. "Banjir Di Pesisir Tangerang Amdal Dan Tata Ruang Di Kabupaten Tangerang Musti Di Kaji Ulang." 2023. Diambil 13 April 2023

(<https://mediarakyatnews.com/banjir-di-pesisir-tangerang-amdal-dan-tata-ruang-di-kabupaten-tangerang-musti-di-kaji-ulang/>).

Terpadu, Web. 2022. "5 Kecamatan Rawan Banjir, BPBD Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana."